

BAB V

PENUTUP

A. Ringkasan Kajian Akhir

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang sudah diuraikan dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan terhadap skema perhitungan PPh Pasal 21. Sebelumnya, perhitungan menggunakan tarif progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Tarif progresif ini dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi biaya yang diperkenankan termasuk PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Dengan diberlakukannya PP 58/2023, skema perhitungan berubah menjadi menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang lebih sederhana dan diterapkan secara bulanan dan pada masa pajak terakhir. Dalam skema TER, perhitungan pajak dilakukan dengan mengalikan tarif yang lebih sederhana, hanya dengan satu lapisan tarif, langsung pada penghasilan bruto pada bulan tersebut tanpa pengurangan biaya-biaya lainnya.
2. PT XXX telah mengimplementasikan skema TER dalam perhitungan PPh Pasal 21, dengan memastikan bahwa gaji pegawai tetap yang sudah masuk dalam kategori di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dihitung sesuai ketentuan PP 58/2023 dan dapat dikatakan berhasil. Dapat disimpulkan bahwa praktik perhitungan bulanan PPh Pasal 21 di PT XXX sudah sesuai dengan skema baru yang ditetapkan dalam PP 58/2023.
3. Sebagai pemotong, PT XXX memiliki persepsi yang positif terhadap penerapan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang diatur dalam PP 58 Tahun 2023. Penerapan skema TER dianggap

menyederhanakan dan mempercepat proses perhitungan pajak, membantu perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih akurat dan sesuai peraturan, meningkatkan kemudahan dalam administrasi perpajakan, sehingga mengurangi risiko kesalahan.

PT XXX telah menerapkan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan berdasarkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai dengan PP 58/2023. Menurut Tuan Y proses perhitungan pajak menjadi lebih mudah tanpa perlu mempertimbangkan potongan lainnya. Skema TER di PT XXX diperkirakan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Meskipun awalnya sulit dipahami, seiring waktu baik perusahaan maupun karyawan, termasuk Tuan Y, dapat menerima dan menyambut perubahan ini dengan baik. Tuan Y berharap pemerintah mempertimbangkan pemberian keringanan tarif pemotongan pajak untuk membuat perhitungan dan pembayaran pajak lebih murah, serta menyesuaikan tarif pemotongan pajak untuk keringanan lebih lanjut. Berdasarkan wawancara dengan Tuan Y pada 21 Mei 2024, skema TER memudahkan Tim Finance and Tax dalam menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 21 pada periode tertentu.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti, sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh terbatas hanya diberikan data berupa slip gaji salah satu pegawai tetap di PT XXX pada bulan Januari 2024 yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah pemotongan penghasilan teratur berupa gaji atau upah, tunjangan dan imbalan yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dan penghasilan tidak teratur berupa bonus yang diterima oleh karyawan. Sehingga berpengaruh dengan besarnya Pajak

Penghasilan Pasal 21 disetiap bulannya dan tidak ada pembandingan yang detail dengan bulan berikutnya.

2. Jumlah responden yang terbatas karena tidak seluruh pegawai diperbolehkan atau diijinkan oleh perusahaan untuk membicarakan hal pajak dan gaji.
3. Waktu yang tersedia terbatas untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara mendalam dikarenakan regulasi perpajakan yang sering berubah sehingga tidak mencakup perubahan terkini.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT XXX di Yogyakarta, hasil analisis dan pembahasan yang telah disimpulkan di atas. Maka dapat diberikan saran sebagai bahan masukan sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Pembaca diharapkan untuk memahami perubahan signifikan dalam skema perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dengan memperhitungkan perubahan potongan pajak yang mungkin terjadi.

2. Bagi Pengambil Keputusan

Pengambil keputusan diharapkan memastikan bahwa sistem penggajian dan pemotongan pajak sudah diperbarui sesuai dengan ketentuan PP 58/2023 untuk menghindari kesalahan dan memastikan kepatuhan perpajakan. Sehingga mengetahui dampak perubahan skema PPh Pasal 21 pada pendapatan bersih karyawan serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi internal terkait perubahan peraturan perpajakan,

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh rincian data berupa slip gaji setiap bulannya sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No 58 Tahun 2023 atau dengan melibatkan berbagai perusahaan dan sektor industri lainnya, sehingga lebih

mudah untuk menilai dampak jangka panjang dari perubahan skema perpajakan dengan membandingkan dan menyimpulkan hasil penelitian tentang dampak PP 58/2023.

D. Pengetahuan Serta Pengalaman Yang Diperoleh

Pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh dari kajian tugas akhir berdasarkan metode wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi adalah pemahaman berkaitan perubahan skema perhitungan yang baru sesuai dengan PP nomor 58 Tahun 2023 dengan melakukan penerapan melalui salah satu karyawan di PT XXX yang memperoleh hasil melalui perbandingan pendapatan bersih yang diterima oleh Tuan Y antara sebelum dan sesudah melakukan penerapan skema PP 58 tahun 2023. Kemudian proses penerapan skema di PT XXX sudah memenuhi ketentuan yang berlaku sekarang, sehingga PT XXX sebagai pemotong pajak terhadap karyawan tetap mendapatkan kemudahan melalui proses perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak.

Kajian dalam Tugas akhir ini relevan dengan mata kuliah Perpajakan khususnya mata kuliah praktikum PPh WPOP, praktikum PPh 21/26 dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat tantangan dalam meyakinkan para karyawan dan vendor untuk menerapkan dan menaati peraturan terbaru yaitu PP nomor 58 tahun 2023. Pada akhirnya PT XXX sendirilah yang memberikan contoh berupa pemahaman dan penerapan berkaitan dengan skema perhitungan yang baru yaitu TER melalui slip gaji Tuan Y sebagai salah satu tetap di PT XXX.